



---

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA**

**Gema Refira Nugraha, Rohmi Ardiansah, Siti Tiara Maulia**  
Universitas Jambi  
Gemarefira11@gmail.com

### **Abstract**

*All levels of education include instruction in fundamental topics, and citizenship lessons have been incorporated into the curriculum. Realizing the objectives of national education is the task and a component of citizenship classes. Since great citizens cannot always support long-term progress within the country in question, the goal of citizenship education is to mold its citizens into great citizens. This question-and-answer technique incorporates reflective writing or a scientific study technique, which contains problem-related hypotheses and gathers data by reading books, reports, notes, and reports about how to handle problems. It is hoped that teaching in Indonesia will empower students to become citizens. They are steadfast and trustworthy in defending the unified state of the Republic.*

### **Abstrak**

Pelajaran kewarganegaraan telah dimasukkan dalam program pendidikan, dan pembelajaran dilakukan dalam pelajaran dasar di semua tingkatan. Pekerjaan dan bagian dari pelajaran kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Inti dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk membentuk warga negaranya menjadi warga negara yang hebat, karena warga negara yang hebat tidak dapat serta merta mendukung kemajuan yang berkelanjutan di dalam bangsa yang bersangkutan. Strategi tanya jawab ini meliputi tulisan renungan atau strategi telaah ilmiah, yang memuat hipotesa-hipotesis hipotetik yang berkaitan dengan penyelidikan masalah, yang mengumpulkan informasi dengan mengkaji buku-buku, laporan, catatan dan laporan yang berkaitan dengan penanganan masalah, dan diyakini bahwa pengajaran di Indonesia akan memberdayakan siswa. diatur untuk menjadi warga negara. Mereka tegas dan handal dalam menjaga negara kesatuan NKRI, dan pemajuan karakteristik bangsa dimanfaatkan sebagai penggerak kemajuan negara yang sebesar-besarnya. Ini menyiratkan bahwa setiap upaya peningkatan harus terus menerus dikoordinasikan pada sudut yang berdampak positif pada pembentukan karakter.

### **Pendahuluan**

Instruksi kewarganegaraan adalah bagian dari keseluruhan kerangka instruksi nasional. Oleh karena itu, pegangan instruksi kewarganegaraan termasuk dalam modul pendidikan dan pembelajaran di semua tahapan pengajaran dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pekerjaan dan bagian dari pelajaran sipil adalah untuk tujuan pelajaran nasional. Untuk dapat memperoleh mata pelajaran/mata pelajaran pelajaran Kewarganegaraan. pada saat itu diuraikan, dikembangkan, dilaksanakan, dan dinilai dalam pengaturan tujuan instruksi nasional. Karena semua ini adalah pembentukan dan pola pikir pendidikan kewarganegaraan.

### **Article History**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 20 Maret 2023  
Published: 31 Maret 2023

### **Key Words**

*Instructions, Instructions of citizenship, character.*

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 20 Maret 2023  
Published: 31 Maret 2023

### **Kata Kunci**

*Instruksi, Instruksi kewarganegaraan, karakter.*



Instruksi kewarganegaraan dapat menjadi bentuk pembinaan masyarakat untuk mendukung dan membentengi persoalan legislasi di negaranya, asalkan persoalan legislasi merupakan hasil dari pemahaman. Tidak dapat dipahami jika instruksi sipil bertentangan atau berlawanan dengan masalah legislatif di negara itu. Sebaliknya, instruksi kewarganegaraan menopang dan memperkuat isu-isu legislatifnya. Alasan PPKn sendiri adalah agar warga negaranya menjadi warga negara yang baik, karena warga negara yang hebat secara tidak langsung mendukung terpeliharanya bangsa yang bersangkutan.

Metode pengajaran Kewarganegaraan adalah mendidik dan membina siswa dalam pengertian tersebut Metode dan hasil pengajaran ini harus dapat mendorong peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran mempersiapkan diri untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk membangun kemampuan belajar yang akan berguna bagi kehidupan dan masa depan kehidupan bangsa itu. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan persiapan instruktif untuk membangun kemauan dan kemampuan yang baik untuk menciptakan imajinasi yang mencerminkan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Instruksi Kewarganegaraan (Instruksi Kewarganegaraan) yang menempatkan sudut pandang instruktif secara relatif, seperti:

mendidik sejarah penataan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, jiwa bela negara dan karakter dalam program pendidikan pengajaran bahasa Indonesia..

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan ciri-ciri umum yang dapat berubah atau berkembang tergantung pada keadaan. Presentasi bersifat deskriptif karena hasil pengumpulan data diceritakan daripada angka. Penelitian ini dikenal dengan penelitian kepustakaan, baik dengan menggunakan pendekatan pustakawan maupun dengan mengumpulkan literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan beserta dokumen-dokumen yang relevan.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan

Dokumen tentang keragaman suku, agama, ras, dan golongan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. dan kemudian, sebagaimana mestinya, suku, agama, ras, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk jurnal, laporan penelitian, jurnal akademik, surat kabar, buku yang relevan, hasil seminar, makalah akademik yang tidak dipublikasikan, sumber, keputusan, dll. Keanekaragaman antar kelompok dalam kerangka. Sumber data primer diperoleh dari literatur untuk penelitian ini



---

## **PEMBAHASAN**

Pengertian Pendidikan Kewarga- negara

Civic education atau Pendidikan kewarganegaraan adalah program instruktif yang memiliki lingkungan yang menarik yang didasarkan pada hipotesis disiplin ilmu sosial, khususnya intrik dan multidimensi, dan disiplin ilmu ini didasarkan pada disiplin ilmu politik yang terorganisir. Sependapat dengan National Board for Social Research (NCSS), kewarganegaraan bisa menjadi pegangan yang menggabungkan semua dampak dan poin positif untuk membentuk pandangan warga negara tentang peran mereka dalam masyarakat. Sebagai program yang bersifat instruktif, tujuan kewarganegaraan yang paling besar adalah untuk membangun warga negara yang unggul berdasarkan kondisi, pedoman, dan tolak ukur perkiraan (sebagaimana diatur dalam Prelude of the 1945 Structure) (Cholisin, 2000:1.7).

Pada kesempatan yang sama, Nu'man Soemantri menjelaskan bahwa PPK merupakan program yang bersifat instruktif

dengan pusat pemerintahan kerakyatan politik buat dengan menciptakan sumber informasi lain, dan berdampak besar pada instruksi sekolah, masyarakat, dan wali. Dalam rangka memberikan pengaruh positif, semua ini bermuara pada terciptanya kemampuan berpikir dasar siswa. Melaksanakan kegiatan berdasarkan hukum secara sistematis dan merencanakan kehidupan kekuasaan mayoritas sepaham dengan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 1.7). Sependapat dengan Sunarso, dkk (2008: 1), pelajaran PKn dapat menjadi bidang penyelidikan yang misinya mendidik manusia Indonesia melalui lorong “pengajaran berbasis nilai”.

Pengaturan atau kerangka kerja kewarganegaraan dibangun berdasarkan standar yang mengikuti: Pada awalnya, program pendidikan kewarganegaraan digariskan sebagai tema pembelajaran yang mengarah pada pembentukan potensi diri dan warga negara terdidik yang berakhlak, cerdas, partisipatif, dan berwawasan. Saat ini, kewarganegaraan secara hipotetis digariskan sebagai subjek yang sudut kognitif, emosional, dan psikomotoriknya berkoordinasi dalam ruang lingkup pemikiran, nilai, konsep dan etika Pancasila, aturan mayoritas pemerintahan dan substansi negara, atau saling merasuk dan berbaur. pertahanan. Ketiga.

Kewarganegaraan pada hakekatnya digariskan sebagai mata pelajaran, penekanannya pada substansi yang mengandung nilai-nilai dan perjumpaan belajar dalam bingkai berbagai perilaku yang harus tercermin dalam keberadaannya, khususnya mempelajari kehidupan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara. negara . yang menggambarkan pertimbangan, nilai, konsep dan etika Pancasila, mayoritas aturan kewarganegaraan dan pertahanan kehidupan sosial nasional.

Oleh karena itu, jika pusatnya ada di bidang penyidikan, filosofi PKN yang sangat diperlukan adalah perilaku warga. Bagaimanapun juga harus disadari bahwa perilaku warga sangat erat kaitannya dengan lingkungan, sehingga bidang ini mengkaji lingkungan tempat tinggal warga dan tempat tinggalnya. Keadaan tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku yang tampak oleh orang tersebut dalam keadaan atau kondisi tertentu, misalnya karena



orang tersebut dapat menjadi bagian dari keluarga, bagaimana orang tersebut menjalankan sebagai warga negara di rumah tangga? Bagaimana orang bermain, berpikir, bekerja dan bertindak sebagai individu-individu pelajaran di sekolah karena mereka adalah individu-individu sekolah. Ini bisa menjadi cara dia menjalankan masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan mayoritas atau masyarakat yang ramah, apakah dia bagian dari partai politik atau bagian dari organisasi sosial?

#### B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara umum PKn menunjuk pada perwujudan nilai dan etika setiap warga negara dalam Pancasila, nilai dan norma Struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan komitmen Solidaritas dalam Perbedaan, serta komitmen terhadap solidaritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan cara ini, secara sengaja dan metodis, dalam memahami dengan peningkatan dan penelitian otak dan landasan kehidupan, memberdayakan siswa untuk merenungkan kehidupan penuh sistem berbasis suara, khususnya belajar sistem berbasis suara, belajar dalam iklim, dan memperkuat melalui pembelajaran aturan mayoritas. pemerintah dan Menyetujui pusat program pendidikan yang dikutip oleh Sunarso, dkk (2008:11), Instruksi Sipil poin untuk menyediakan kapasitas pengambilan:

- a. Berpikir secara mendasar, masuk akal dan kreatif tentang isu-isu kewarganegaraan.
- b. Tinggi kualitas, mampu berperan serta, dan bertindak mengagumkan dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Buat dengan tegas dan mudah ditangkap, bentuk diri Anda dengan karakter negara Indonesia, dan memungkinkan mereka untuk hidup dengan bangsa lain.
- d. Memanfaatkan inovasi data dan komunikasi untuk terhubung secara khusus atau berimplikasi dengan negara-negara lain di dunia.

Sependapat dengan Ahmad Sanusi, Cholisin (2000:1.17) menunjukkan bahwa lebih sering daripada tidak sebagian besar tujuan pengajaran kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Hidup kita dijamin oleh Struktur.
- b. Menyetujui pembangunan nasional diarahkan oleh struktur.
- c. Meningkatkan kesadaran sipil melalui instruksi dan uang politik.
- d. Mengajar warga negara yang penuh perhatian.
- e. Persiapan pemerintah populer.
- f. Berpartisipasi secara efektif dalam usaha terbuka.
- g. Sekolah berfungsi sebagai fasilitas penelitian untuk sistem berbasis suara.
- h. Strategi pengambilan keputusan.
- i. Persiapan otoritas.
- j. Pengawasan berdasarkan hukum terhadap cabang-cabang resmi dan berwibawa.
- k. Tingkatkan pemahaman dan partisipasi di seluruh dunia.

#### C. Penyusunan Instruksi Kewarganegaraan

Struktur 1945 yang menjadi premis yang dilindungi di awal bagian keempat harus menjadi premis hipotesis untuk alasan negara. Salah satu tujuan negara dapat diperjelas dari



artikulasi “petunjuk hidup bernegara”. Jika dilihat, kata ketiga ini memiliki makna yang mendalam. Kehidupan instruktif di suatu bangsa memuat data tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak di bangsa tersebut. Dalam kehidupan warga negara, penjelasan ini menyampaikan informasi kepada pimpinan negara dan setiap orang, untuk memberdayakan mereka agar memiliki kemampuan berpikir, bertindak dan bertindak dalam rangka mengatasi persoalan bangsa dan sosial serta pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Kerangka Instruksi Nasional sebagai landasan dan data bagi dunia perdagangan yang terkait dengan instruksi negara. Dalam Pasal 3 ayat (2) tentang kemampuan dan tujuan negara disebutkan bahwa bagian dari pelajaran nasional adalah membangun dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam kehidupan pengetahuan bernegara, dengan tujuan membangun negara. bangsa. Individu yang berakhlak mulia, kokoh, terpelajar, mampu, imajinatif, bebas, taat hukum dan dapat diandalkan berpotensi untuk berkembang menjadi manusia yang hebat. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional” tentang integritas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib bagi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini mempunyai posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional negara. Arah pengembangannya harus fokus pada menjadikan siswa agar menjadi orang Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Perkembangan disiplin ilmu PKn di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembinaan warga negara berdasarkan hak dan kewajibannya. Sejak didirikan pada tahun 1957, nama dan program warga telah berubah selama enam puluh tahun terakhir.

Dalam tatanan watak dan tatanan negara seperti ini, pendidikan kewarganegaraan mencakup pekerjaan dan bagian yang sangat vital. Pendidikan kewarganegaraan dapat berupa pengajaran peningkatan karakter yang teratur dan teratur, yang tidak terpisahkan dari sistem pengaturan perbaikan bangsa, perbaikan bangsa, dan pembangunan karakter.

Di tengah 72 tahun otonomi, Indonesia mengalami berbagai peristiwa yang melemahkan penilaian bangsa. Untuk itu perlu ditanamkan pemahaman yang mendalam serta komitmen yang teguh dan mantap terhadap standar jiwa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Tata Negara Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. komponen bangsa, khususnya sebagai penerus negara. negara, generasi muda.

Di masa depan, Indonesia akan menikmati jauh lebih baik, jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat, lebih baik">kehidupan kekuasaan mayoritas yang lebih kuat, dalam artian tatanan pemerintahan akan lebih terjamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , warga negara berhak melaksanakan norma-norma yang berlandaskan hukum.Demi keindahan negara dan negara Indonesia, kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat yang berlandaskan hukum,pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam cara hidup harus diakui, dimulai, diinternalisasi dan diaktualisasikan. Pemerintah kerakyatan suatu bangsa dapat berkembang di bawah pengawasan warga dari pemerintahan kerakyatan. Warga



negara dari pemerintahan populer tidak menghargai hak atas kesempatan individu, tetapi juga harus berbagi kewajiban dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cemerlang. Pada kenyataannya, kehidupan kekuasaan mayoritas adalah tujuan yang diwujudkan dan diberikan ketika para pendiri negara dan negara mulai membahas dan mendefinisikan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan karakter bangsa merupakan pilar kemajuan bangsa. Hal ini berimplikasi bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu dikoordinasikan pada perspektif yang berdampak positif pada sifat perbaikan. Padahal, hal ini seringkali secara alami tercermin dalam misi pembangunan nasional. Sejalan dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025” (dalam Zubaidi, 2011:7), pendidikan karakter ditempatkan sebagai tugas utama dari delapan tugas untuk mewujudkan visi perbaikan bangsa. Kokoh, berdaya saing, bermartabat, dan beretika berlandaskan Pancasila yang memperhalus unsur-unsur sifat dan perilaku masyarakat dan Perorangan Indonesia, perbedaan bangsa dan negara Indonesia, keyakinan dan ketakjuban akan kekuasaan, kebajikan, toleransi, dan partisipasi, berjiwa patriotisme, berjiwa pembangunan, dan berwawasan iptek.

Peran warga negara sebagai garda depan pengajaran karakter terlihat jelas, mereka harus mengkoordinasikan nilai-nilai karakter dalam latihan belajar mengajar, karena hal ini sering diungkapkan secara jelas dalam tujuan pembelajaran warga menurut (Darmadi, 2010:52), khususnya:

Kemajuan etika yang diharapkan dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tindakan penyebaran keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan yang beriman, tindakan kemanusiaan dalam kesetaraan dan kemanusiaan, serta perluasan kegiatan untuk meningkatkan solidaritas nasional dalam masyarakat. Tingkah laku terbuka mendukung masyarakat yang memiliki kesamaan antarmuka atas orang dan mengumpulkan antarmuka, untuk mewujudkan perbedaan dalam pemikiran, pembayaran atau antarmuka melalui konsultasi perjanjian, dan mendukung upaya untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan sasaran tersebut, dapat diketahui bahwa pembelajaran kewarganegaraan adalah pembelajaran yang substansi pembelajarannya sarat dengan nilai-nilai pribadi. Namun, masalah yang peneliti temukan di bidang ini adalah bahwa pembelajaran dan mengasah pengajaran kewarganegaraan yang dilaksanakan di dalam kelas saat ini terbatas pada pengajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan kognitif atau informasi. Sementara itu, terang-terangan, hal-hal yang berkaitan dengan metode pembentukan karakter/sikap siswa seringkali dikesampingkan. Tahta Suwama (Budimansyah, 2012:450) terlalu membentengi tahta ini, khususnya: siswa dalam keadaan tidak aktif dapat menerima status kursus kapan saja, pengetahuan lebih mendasar daripada keadaan pikiran dan kemampuan, dan penggunaan strategi dibatasi untuk tidak baik. situasi belajar dan satu arah. Oleh karena itu, perlu dimulai dengan menata, mengaktualisasikan, dan menilai untuk menapaki langkah pembelajaran PKn dalam membentuk karakter siswa. Kita harus mampu menata, melaksanakan, dan menilai untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang ada, karena



mengembangkan nilai-nilai karakter tidak hanya menuntut pengajaran tetapi lebih dari itu pemajuan.

Mata pelajaran Kewarganegaraan memang merupakan salah satu mata pelajaran yang kaya akan nilai-nilai karakter. Kewarganegaraan adalah salah satu zona pembelajaran karakter yang paling banyak. Dengan demikian, tujuan karakter yang ditetapkan dalam PKn benar-benar merupakan dampak dari pengajaran, bukan hanya dampak dari pendampingan.

Biasanya sejalan dengan aturan pemajuan silabus dengan ciri-ciri Layanan Instruksi Nasional yang dikutip dalam Gunawan (2012:226), aturan ini mengarah pada pembelajaran pengembangan dan membantu siswa dalam membentuk karakter. pengambilan setelah tugas harus diselesaikan:

- a. Menambah dan/atau menyesuaikan latihan-latihan pembelajaran sehingga memuat latihan-latihan pembelajaran yang dapat membentuk nilai-nilai karakter yang ditentukan.
- b. Memasukkan dan/atau menyesuaikan metode penilaian sehingga dapat tercipta metode penilaian untuk pemajuan karakter dan/ atau diukur.

Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan warga negara untuk menjadi warga negara yang hebat dan warga negara yang cerdas dalam menghadapi kemajuan dunia di era persaingan. Pembelajaran pendidikan karakter dalam kewarganegaraan dapat menjadi solusi yang dapat merevitalisasi peran warga negara sebagai pengajaran yang logis yang dapat menjadi bidang kecemerlangan dalam pembentukan karakter siswa. Kewarganegaraan dapat menjadi mata pelajaran kewarganegaraan, dan bahan kain memiliki nilai-nilai karakter yang kaya, yang dapat membantu menawarkan bantuan mengkoordinasikan konsep instruksi karakter. Pembinaan karakter siswa tidak bisa seperti yang dipelajari melalui materi materi kewarganegaraan, tetapi juga secara tidak langsung melalui berbagai tahapan latihan pembelajaran. Selain itu, peningkatan karakter dapat lebih ditunjang dengan pemanfaatan strategi pembelajaran, media dan aset pembelajaran.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa, artinya pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (good citizen) dan smart citizen (warga negara yang cerdas) guna menghadapi perkembangan dunia di era persaingan. Pendidikan karakter dalam pembelajaran kewarganegaraan merupakan solusi yang dapat merevitalisasi peran warga negara sebagai disiplin ilmu yang merupakan ladang unggulan dalam pembinaan karakter peserta didik. Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran kewarganegaraan, dan muatan materinya memiliki nilai karakter yang kaya, yang selanjutnya akan membantu mengintegrasikan konsep pendidikan karakter. Pengembangan karakter siswa tidak hanya dapat dikembangkan melalui muatan materi kewarganegaraan, tetapi juga secara tidak langsung melalui berbagai tahapan kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengembangan karakter siswa juga dapat didukung dengan penggunaan metode, media dan sumber belajar.



---

### **Daftar Pustaka**

- A Akbal, M. (2017, October). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 485-493).
- Budimansyah, D. 2008. "Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)" dalam *Acta Civicus* Vol. 1. Nomor 2, April 2008.
- Budimansyah, D. 2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., Syaifulah, S. 2006. *Pendidikan Nilai-Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Cholisin. 2011. *Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran Pkn*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saputra, E. (2016). Peranan Metode Diskusi Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Tingkap*, 11(1), 26-40.
- Somantri, Nu'man. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung: PPS-FPIPS UPI.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suwito, A. (2012). Integrasi Nilai Pendidikan Karakter ke dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Melalui RPP. *CIVIS*, 2(2/Juli).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas, Jakarta.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196-205.
- Winarno. (2020). *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan edisi keempat*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.